

DINAMIKA OPINI PUBLIK, KINERJA PEJABAT, DAN LEGITIMASI AKTOR POLITIK: DILEMA VIRALITAS DAN KRISIS KEPERCAYAAN PUBLIK

Bambang Mudjiyanto¹, Nursyamsi², Fit Yanuar^{3*}, Nur Azizah⁴, Launa⁵

^{1,4} Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bung Karno, Jakarta

² Dosen Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik, UNIMUDA, Sorong

^{3,5} Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Sahid, Jakarta

*Email: fit_yanuar@usahid.ac.id

ABSTRAK

Studi ini bertujuan menganalisis dinamika opini publik terkait statement pejabat publik dan aktor politik di ruang medsos—kendati viralitas opini bisa memicu public distrust. Melalui pendekatan kualitatif, deskriptif, dan interpretif berbasis analisis kritis dan konstruktivis, studi ini berupaya mengeksplor bagaimana opini publik dibentuk, diviralisasi, dan berimplikasi pada kredibilitas diri dan legitimasi institusi. Temuan studi menunjukkan: pergeseran sentimen publik tidak bersifat reaktif, namun konstitutif—aktif mendinamisasi ruang politik publik melalui mobilisasi emosi yang bisa memaksa para elite mengoreksi kebijakan, menarik diri, atau kehilangan dukungan. Ada kesenjangan struktural antara logika teknokratis birokrasi dan harapan publik terkait partisipasi digital, di mana publik menilai opini bukan dari otoritas jabatan, namun dari konsistensi nilai yang dianut, tindakan nyata, dan akuntabilitas narasi. Fenomena ‘Purbaya effect’ menjadi contoh disfungsi elite dalam konstruksi narasi. Tesis ini mengonfirmasi bahwa konstruksi narasi yang eksentrik, jujur, konsisten, dan inklusif—secara moral—cukup efektif untuk merebut kembali public trust di tengah viralitas isu dan polarisasi opini era medsos yang kian konfliktual. Studi ini merekomendasi model ‘legitimasi responsif-deliberatif’ sebagai acuan pejabat dan elite politik untuk membangun kembali kepercayaan publik, sepanjang elite mau mentransformasi kritik publik sebagai wujud atensi dan dialog, bukan diksi ancaman, apalagi frasa hinaan.

Keywords: *Opini publik, viralitas isu, krisis legitimasi, kepercayaan publik, responsif-deliberatif.*

1. PENDAHULUAN

Di era demokrasi digital, kebebasan berekspresi tidak hanya bergerak dinamis, tetapi juga problematis. Saat ini, partisipasi politik versi media sosial (selanjutnya disingkat medsos) menjadi arena yang bersifat ganda: sebagai ruang komunikasi dua arah antara elite dan publik, sekaligus pengawasan kinerja pejabat birokrasi dan para aktor politik (Schedler et al., 1999). Dalam konteks ini, media—cetak, elektronik, maupun daring—tak lagi berperan tunggal sebagai saluran pasif penyalur informasi publik, melainkan inisiator pembentuk agenda publik, mediator konflik,

dan aktor reproduksi tatanan sosial-politik. Transparansi, partisipasi, dan responsibilitas sebagai elemen kunci demokrasi, saat ini bergantung pada kapasitas media massa dalam mengonstruksi viralitas opini, yang potensial mengubah persepsi atau preferensi politik publik (warganet) (Couldry & Hepp, 2017).

Sejak awal pemerintahan Prabowo, gaya komunikasi pejabat dan politisi seperti menteri, kepala lembaga, atau elite parlemen—banyak mendapat sorotan tajam di ruang publik, tidak hanya karena opini mereka yang dianggap *blunder*, melainkan akibat ketidakselarasan antara fungsi institusional elite dan performa

komunikatifnya dalam derajat akuntabilitas *god and clean government* (Tapsell, 2023). Opini atau pernyataan mereka—dalam konferensi pers, wawancara media, maupun komen pribadi di medsos—justru memicu reaksi luas karena: (1) mengandung frasa/diksi yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian birokrasi; (2) mereproduksi narasi sentralistik atau defensif yang dikaitkan dengan rezim otoritarian masa lalu; dan (3) gagal memenuhi transparansi, empati, dan koherensi nilai—terutama di tengah krisis kepercayaan publik pada perilaku elite yang kian masif (Febrianto et al., 2025).

Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara logika teknokratis birokrasi dan logika partisipasi ruang publik, di mana setiap ucapan elite tidak lagi dinilai semata dari keabsahan formal-jabatan, melainkan dari kelayakan moral, akuntabilitas, dan prinsip kehati-hatian dalam membuat pernyataan. *Bureaucratic prudence* ala Weber (1864-1920) yang mengacu pada nilai profesional birokrasi yang menekankan kehati-hatian, netralitas, dan tanggung jawab institusi—akan terus diuji oleh kecepatan dan autentisitas. Dalam konteks *discursive institutionalism*, ketegangan di ruang publik ini menunjukkan problem di level *coordinative discourse* (di antara pejabat dan politisi) dan *communicative discourse* (antara elite vs publik)—dua pilar penting pembentuk legitimasi politik dan prinsip-prinsip demokrasi responsif-deliberatif (Schmidt, 2008).

Dalam perspektif komunikasi politik, fenomena ‘Purbaya *effect*’—yang viral di ruang medsos di awal Agustus 2025 lalu misalnya, tak sekedar peristiwa daya ungkit komunikasi, tetapi fenomena pertarungan narasi politik yang menjadi titik balik transformasi kebijakan publik di ranah ekonomi (Kompas.com, 2025).

Fenomena Purbaya *effect* menjadi representasi pertarungan dua faksi kebijakan ekonomi Indonesia yang berbeda, yakni antara ‘faksi moneteris’ (yang berpihak pada stabilitas nilai tukar, independensi bank sentral, dan kontrol inflasi) versus ‘faksi fiskal’ (yang berpihak pada ekspansi anggaran, intervensi negara, dan kebijakan pertumbuhan ekonomi) (Haggard & Kaufman, 2021). Fenomena ini merepresentasi adanya pergeseran struktural dari model komunikasi *top-down* ke model komunikasi sirkuler-partisipatif (atau *bottom up*), di mana medsos menjadi arena utama reproduksi wacana politik: ruang di mana opini publik tidak sekedar ditransmisi, tetapi juga di negosiasi, di konfrontasi, dan—dalam beberapa kasus—digunakan untuk *men-down grade* legitimasi atau memaksa elite untuk merubah kebijakan publik (Tapsell, 2017).

Tak sekedar saluran distribusi informasi, medsos kini menjadi medan pertarungan opini (*opinion battlefield*), tempat isu-isu sensitif—seperti subsidi, kesenjangan ekonomi, atau korupsi—dengan cepat mengkristal menjadi tekanan kolektif publik. Transformasi ini ditandai oleh melemahnya hierarki komunikasi tradisional: dimana para elite kini berinteraksi secara langsung dan *real-time* dengan warga, sementara narasi politik (faktual maupun *fake news*) menyebar lebih cepat dan viral, lintas usia dan kelas sosial—dan sering kali memicu ledakan emosi publik yang melampaui proporsi peristiwa pemicunya (Pradipta et al., 2023).

Akibatnya, dinamika opini publik di ruang medsos terus beroperasi dalam irama fluktuatif (mudah berubah), fragmentatif (mudah terpecah), dan inkonsisten (beganti-ganti)—tidak hanya dipengaruhi oleh peristiwa objektif, tetapi juga oleh logika algoritmik, strategi

framing elite, serta eksploitasi emosi kolektif publik. Dalam ekosistem ini, respon emosional publik kerap mendahului rasionalitas. Sentimen publik di medsos saat ini tidak lagi bersifat reaktif, namun aktif membentuk realitas politik: dapat menggerakkan aksi kolektif warganet untuk memaksa elite politik atau pejabat publik menarik diri dari ruang publik.

Perubahan sentimen publik tidak hanya mencerminkan penilaian terhadap kinerja, tetapi juga persepsi terhadap integritas, empati, dan konsistensi opini/narasi yang disampaikan. Fenomena seperti *cancel culture* (boikot), *bandwagon effect* (efek mengekor), atau konflik identitas ikut memperumit situasi. Politisi Indonesia, dengan ragam *statemen*-nya, seringkali mendapat kritik publik karena opininya dianggap nirempati atau keputusan yang dibuat merugikan kepentingan publik. Respon publik terhadap tokoh-tokoh ini seringkali disuarakan publik lewat saluran medsos, seperti respon atas isu “Kepala Babi” (Hasan Nasbi); isu #KaburAjaDulu (Noel Ebenezer); atau respon atas pernyataan Dadan Hindayana “Penampilan atlet Indonesia yang buruk, akibat kekurangan gizi”; Romo Syafi’i “Ormas minta THR, sudah menjadi budaya Indonesia”; Maruli Simanjuntak “Yang menolak RUU TNI, otaknya kampungan”; atau *statement* Budi Gunawan Sadikin yang coba “Membandingkan ukuran celana jeans orang Indonesia dengan usia harapan hidup”.

Adapun studi terdahulu tentang politik dan tata kelola digital di Indonesia menunjukkan peta dikotomi struktural: di satu sisi, platform digital membuka ruang partisipasi warga dan akuntabilitas horisontal (Hafel 2023; Febrianto et al. 2025); di sisi lain, teknologi digital dimanfaatkan sebagai instrumen *soft control*

oleh pejabat dan politisi melalui instrumen digital, seperti transmisi narasi, konstruksi pernyataan yang memicu emosi publik, framing yang diarahkan, atau produksi *satire* politik (Masduki 2021; Salma 2024; Fanani 2025). Di sisi lain, upaya reformasi birokrasi menghadapi tantangan di level implementasi: antara tuntutan efisiensi teknis, legitimasi politik, dan kebutuhan akan *public trust* yang kian rapuh (Febrianto et al. 2025; Setyawan et al. 2025). Kumpulan temuan hasil riset terdahulu ini menunjukkan bahwa dinamika persepsi publik terhadap kinerja birokrasi dan elite politik tidak bisa dipahami secara linear, melainkan sebagai hasil negosiasi kompleks antara isu penguatan (*empowerment*) dan perlindungan (*enclosure*); atau antara isu partisipasi dan manipulasi dalam ekosistem digital yang secara simultan bisa membebaskan sekaligus berpotensi menekan.

Studi ini bertujuan menganalisis konstelasi opini, *statement*, atau pernyataan publik yang memicu munculnya opini emosional warganet, serta menelusuri implikasi politik dari fluktuasi sentimen publik terhadap opini pejabat publik dan aktor politik Indonesia di ruang medsos. Dengan mengadopsi pendekatan analisis wacana kritis (Fairclough, 2025) yang di-*combine* secara reflektif dengan epistemologi konstruksi sosial (Berger & Luckmann, 2018), studi ini berangkat dari dua asumsi dasar yang saling melengkapi. Pertama, bahwa wacana bukan representasi netral realitas, melainkan praktik sosial yang terstruktur oleh relasi kuasa, yang terus bergerak mereproduksi ideologi dominan, dan secara simultan membentuk subjektivitas, baik subjektivitas di level elite maupun di level publik (Tarumingkeng, 2025).

Kedua, bahwa makna—termasuk penilaian terhadap pejabat dan politisi—dikonstruksi

secara aktif oleh individu lewat interpretasi yang dibentuk oleh latar belakang pengalaman, interaksi simbolik, dan konteks kultural (Berger & Luckmann, 2018). Dari perspektif teoretis ini, pernyataan pejabat atau politisi tidak dapat dipahami sebagai ucapan (*words*), pernyataan (*statement*), atau opini (*opinion*), melainkan sebagai peristiwa diskursif (produksi, konsumsi dan distribusi teks) dalam konteks pertarungan makna, di mana pernyataan resmi, respons warganet, mekanisme algoritma, dan ingatan kolektif publik saling bertaut: membentuk realitas politik semu, tetapi nyata dampaknya.

Melalui eksplorasi atas opini, narasi, atau pernyataan resmi pejabat publik dan politisi, studi ini berupaya mengungkap bagaimana perubahan opini publik terhadap pernyataan pejabat dan politisi, dan bagaimana legitimasi elite dikonstruksi dan mengalami dekonstruksi di ruang medsos dalam konteks sentimen publik yang berciri volatil (tak terduga). Di sisi lain, temuan studi diharapkan juga memberi kontribusi strategis-reflektif bagi pejabat publik dan politisi untuk membangun kredibilitas yang tidak mengandalkan performa retorik semata, melainkan pada konsistensi antara nilai idealisme, tindakan nyata, akuntabilitas—tanpa mengorbankan fondasi *public trust* yang berciri demokratis, partisipatif, dan deliberatif.

2. METODE PENELITIAN

Studi ini berbasis pendekatan kualitatif-deskriptif interpretatif dengan metode etnografi virtual, yang menekankan penelusuran makna terkait praktik, logika, serta partisipasi warganet dalam ruang digital sebagai sebuah lapangan sosial (*field*) yang dinamis (Hine, 2015). Metode ini dipilih karena mampu menangkap kompleksitas interaksi, narasi, serta

sirkulasi opini dan picuan emosi publik secara kontekstual—tidak semata-mata sebagai data tekstual, melainkan sebagai manifestasi praktik politik yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Lokus studi adalah platform medsos dan portal berita daring yang menjadi representasi ruang ekspresi publik (*public sphere*)—medium di mana opini atau diskusi dan kritik publik secara aktif beresonansi. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam terhadap dinamika komunikasi politik dalam konteks digital yang semakin kompleks, rumit, dan bersirkulasi cepat.

Data kajian dihimpun melalui strategi triangulasi sumber, terdiri dari tiga jenis data utama: (1) arsip media sosial; (2) catatan hasil observasi digital non-partisipatif (*digital fieldnotes*); dan (3) studi pustaka dan dokumen sekunder, seperti jurnal, buku, atau *working paper* yang terkait topik kajian untuk mendukung hasil-hasil temuan empiris.

Sampel kualitatif yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sementara metode analisis data bersifat deskriptif, interpretif, dan tematik. Ciri *deskriptif*: memetakan secara sistematis fenomena opini publik—seperti frekuensi jenis narasi (kritik, dukungan, sindiran), bentuk ekspresi emosional (marah, kecewa, dan harapan), dan pola interaksi (serangan langsung atau komen sarkastik) (Creswell & Poth, 2024). Ciri *interpretif*: memahami makna di balik tindakan warganet, bahwa realitas sosial tidak objektif; hasil konstruksi pengalaman, konteks budaya, dan interaksi simbolik (Berger & Luckmann, 2018). Ciri *tematik*: berupaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola makna (*themes*), baik yang muncul secara eksplisit (*semantic*) maupun implisit (*latent*), melalui

proses pengoden terbuka → aksial → selektif (Braun & Clarke, 2022).

3. PEMBAHASAN

Blunder opini, pernyataan, atau *statement* publik yang dibuat para pejabat dan politisi Indonesia sepanjang tahun 2025 lalu terjadi saat kesalahan verbal, inkonsistensi, dan lemahnya kepekaan sosial memicu gejala publik yang berdampak negatif pada citra dan kepercayaan publik pada pejabat pemerintah dan para aktor politik.

Teori manajemen citra (*image repair theory*) dari Benoit (1997) berhasil memetakan strategi retorik yang kerap digunakan elite saat citranya terpuruk akibat opini *blunder* yang terlanjur mereka buat, seperti: ‘tidak mengakui pernyataannya’ (*denial*); mencari-cari ‘alasan pembenar’ (*excuse*); enggan/malas melakukan ‘koreksi’ (*corrective action*), atau siap bersikap jujur ‘mengakui kesalahan’ (*mortification*).

Teori *source credibility* dari Flanagin dan Metzger (2000) juga berhasil mengidentifikasi kredibilitas pembicara sebagai faktor yang menentukan sejauh mana pesan diterima dan *blurring* informasi bisa dihindari. *Blunder* elite tak semata soal isi, tetapi soal disonansi dan inkonsistensi antara citra yang ingin dibangun versus *statement* emosional-defensif yang ingin di konstruksi. Disonansi dan inkonsistensi opini hanya akan mengikis ‘kepercayaan publik’.

Sementara menurut teori penalaran termotivasi (*motivated reasoning theory*) dari Marcus dkk (2000), publik tidak akan menilai *blunder* elite dari sisi rasional, melainkan dari sisi afeksi; hanya akan memproses informasi secara negatif (*negativity bias*). Akibatnya, *blunder* elite akan mempertajam polarisasi. Tak hanya soal teknis-retorik, *blunder* elite adalah

peristiwa diskursif yang berpotensi memicu *public dissonance*. *Blunder* elite menjadi batu uji bagi eksistensi, kredibilitas, dan legitimasi para aktor itu sendiri. Apalagi saat opini yang mereka konstruksi bertentangan dengan etika, logika, dan emosi publik—menciptakan *gap* antara narasi resmi elite versus fakta hidup yang dirasakan mayoritas warga negara.

Rangkaian Opini *Blunder* Pejabat Publik

Statement Emanuel Ebenezer (Wamenaker RI), yang *enggan* ambil pusing terkait tagar #KaburAjaDulu di lini masa medsos sejak awal Februari 2025 lalu. *Statement* Noel dianggap *blunder* oleh warganet; bentuk sikap tidak peduli (nirempati) pejabat negara terhadap kegelisahan dan kekecewaan publik (terutama gen Z) terkait kondisi ekonomi Indonesia. Opini *blunder* ini muncul di tengah suasana kehidupan ekonomi negara yang sulit—dimana anak muda susah mencari kerja, lebih baik kabur ke luar negeri, justru direspons negatif. Bagi WNI (terutama generasi muda) yang ingin bekerja di luar negeri dipersilahkan, kalau perlu jangan balik lagi ke Indonesia. “*Mau kabur, kabur sajalah. Kalau perlu jangan balik lagi*” ungkap Wamenaker, sambil tertawa, di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Senin, 17 Februari 2025 lalu (kompas.com, 2025).



Sumber: [instagram.com/p/DGM_2N7T-RO/](https://www.instagram.com/p/DGM_2N7T-RO/)



Sumber: [youtube.com/watch?v=8h6pejsLPMw](https://www.youtube.com/watch?v=8h6pejsLPMw)

Opini *blunder* lain datang dari pimpinan TNI, Jenderal Maruli Simanjuntak (MS). Selaku pejabat tinggi TNI, MS menyebut kritik publik terhadap isu revisi Undang-Undang TNI “*otaknya kampung*”. Pilihan diksi MS—yang disampaikan di Puslatpur Baturaja, Palembang 12 Maret 2025 lalu—dinilai publik tidak pantas, konotatif, dan merendahkan sikap dan partisipasi publik. Isu itu juga terkait promosi Mayor Teddy Indra Wijaya—Menseskab dari pangkat Mayor ke Letnan Kolonel—yang diduga berbau nepotis dan melanggar Pasal 47 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (tempo.co, 2025c).

Selanjutnya, pernyataan *blunder* Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, soal ‘teror kepala babi’ yang dikirim orang tidak dikenal ke kantor Majalah Tempo. Menanggapi insiden itu, Nasbi dengan santai justru meminta Tempo agar kepala babi itu “*dimasak saja*”. Pernyataan Nasbi memicu reaksi keras dari Andres Hugo Pareira, Wakil Ketua Komisi III DPR, yang menganggap Nasbi asal jawab, arogan, bahkan berpotensi menghina media (detik.com, 2025).



Sumber: [instagram.com/p/DHf9O-mhCQ2/](https://www.instagram.com/p/DHf9O-mhCQ2/)



Sumber: [instagram.com/p/DHgG9ZcTR-D/](https://www.instagram.com/p/DHgG9ZcTR-D/)

Pernyataan *blunder* lainnya, datang dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Dadan beropini: “*rendahnya kualitas gizi masyarakat Indonesia berdampak pada performa pemain sepak bola*”. Menurut Dadan, keterbatasan asupan gizi adalah salah satu alasan mengapa tim nasional sulit bersaing di kancah internasional. “*jadi jangan heran kalau PSSI itu sulit menang, karena main 90 menit sudah berat, kenapa? Karena gizinya tidak bagus. Banyak pemain bola lahir dari kampung,*” kata Dadan yang kicauannya dikutip media massa dan di tweet ribuan *netter* di kantor Kementerian PU, Jakarta, Sabtu, 22 Maret 2025 lalu (tempo.co, 2025b).



Sumber: [instagram.com/p/DHITkUbTd4G/](https://www.instagram.com/p/DHITkUbTd4G/)

Wakil Menteri Agama, Romo Syafi'i juga membuat pernyataan kontroversi. Menurutnya, fenomena Ormas meminta THR menjelang Hari Raya Idul Fitri adalah hal lumrah, sebab ini sudah menjadi budaya yang ada sejak lama di Indonesia, jadi tidak perlu dipermasalahkan. Pernyataan verbatimnya: *"Saya rasa itu budaya lebaran Indonesia sejak dahulu. Nggak perlu dipersoalkan"*. Opini Wamenag itu pun sontak mendapatkan kritik tajam publik, terutama dari netizen/warganet. Pernyataan itu disampaikan Wamenag saat ia menghadiri acara di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu, 19 Maret 2025 lalu (sindonews.com, 2025).

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin (BGS) juga menyebut sejumlah indikator kesehatan yang harus diperhatikan warga, diantaranya dengan melihat melihat lingkaran pinggangnya. Menurut BGS, lingkaran pinggang yang normal atau sehat bagi pria adalah 90 cm ke bawah. BGS mengaitkan ukuran lingkaran pinggang itu dengan ukuran celana jeans. Bila laki-laki lebih dari 33, artinya sudah tidak sehat. *"Pokoknya laki-laki kalau beli celana jeans masih di atas 32-33, udah pasti obesitas. Itu menghadap Allah-Nya lebih cepat dibanding yang celana jeansnya ukuran 32"*, kata BGS kepada wartawan pada acara

peluncuran Pasukan Putih di Jakarta, Rabu 14 Mei 2025 (kumparan.com, 2025).



Sumber: [instagram.com/p/DJoGHsKtcer/?hl=id](https://www.instagram.com/p/DJoGHsKtcer/?hl=id)

Rangkaian Opini *Blunder* Politisi

Tidak hanya pejabat eksekutif yang kerap membuat pernyataan *blunder*, politisi parlemen juga tidak kalah dalam soal ini. Sebagai contoh, Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI, pernah mengeluarkan pernyataan yang menjadi sorotan publik terkait besaran tunjangan rumah bagi anggota DPR yang mencapai Rp 50 juta per bulan—sejenis kompensasi untuk rumah dinas anggota DPR. *"Kita dapat tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan, kita kali 26 hari kerja, jadi jumlahnya Rp 78 juta per bulan"*. Pernyataan Kadir menuai kritik keras karena dianggap kurang sensitif di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sedang sulit (tempo.co, 2025d).



Sumber: [instagram.com/p/DNmxdxLTEsv/](https://www.instagram.com/p/DNmxdxLTEsv/)

Politisi berikut yang membuat pernyataan *blunder* adalah Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Pernyataannya menjadi sorotan publik lantaran ia merespon keras desakan masyarakat untuk membubarkan DPR. Sahroni menyebut, “*mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia*”. Respons *blunder* ini disampaikan Sahroni saat ia melakukan kunjungan kerja di Polda Sumatra Utara, pada Jumat 22 Agustus 2025 lalu (cnnindonesia.com, 2025).



Sumber: [instagram.com/reel/DNred7vZKDS/](https://www.instagram.com/reel/DNred7vZKDS/)



Sumber: [facebook.com/suara.com](https://www.facebook.com/suara.com)

Yang lebih memilukan adalah perilaku anggota DPR yang joget saat Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD pada 15 Agustus 2025. Sikap *childish* anggota DPR itu menjadi anti klimaks paling fatal dari perilaku politik politisi Indonesia pasca reformasi yang sudah mengalami keruntuhan konteks (*context collapse*). Aksi joget-joget di ruang sidang, tak cuma jadi kontroversi, namun ia berujung pada demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota, penjarahan rumah anggota dewan, bahkan pencopotan dan penonaktifan anggota DPR RI oleh sejumlah fraksi partai politik. Di antara anggota dewan yang mendapat sanksi adalah Adies Kadir (Fraksi Golkar), Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach (Fraksi Nasdem), Surya Utama (Uya Kuya) dan Eko Hendro Purnomo alias (Eko Patrio) (Fraksi PAN), dan beberapa nama lain (tribunnews.com, 2025).



Sumber: facebook.com/catatanentrepreneurofficial/

Media juga menyorot pernyataan *blunder* dan kontroversial dari Anggota DPR RI, Deddy Sitorus. Deddy menolak menyamakan pendapatan anggota DPR dengan pendapatan masyarakat, seperti tukang becak atau buruh. Menurutnya, perbandingan itu sebagai ‘sesat logika’ karena menyamakan gaji anggota DPR dengan pendapatan ‘rakyat jelata’. Pilihan diksi ‘rakyat jelata’ dianggap tidak pantas diucapkan oleh seorang wakil rakyat. Pernyataan Deddy—yang disampaikan di salah satu acara dialog televisi nasional itu—menuai banyak kecaman publik di ruang medsos (suara.com, 2025).

Analisis *Blunder* Opini Publik Para Pesohor

Kasus-kasus pernyataan *blunder* pejabat publik—mulai dari *statement* Wamenaker “*Mau kabur, kabur sajalah. Kalau perlu jangan balik lagi*” hingga opini Menkes yang mengaitkan obesitas dengan “*Menghadap Allah lebih cepat*”—bukan sekadar kekeliruan retorik, melainkan gejala dari krisis *bureaucratic prudence*: runtuhnya norma komunikatif birokrasi yang mensyaratkan disiplin narasi (*discursive discipline*), pengendalian emosi (*affective restraint*), dan gaya komunikasi elite (*institutional voice*) sebagai bagian penting dari akuntabilitas publik (Tapsell, 2017). Dalam

perspektif *discursive institutionalism* (Schmidt, 2008), pernyataan elite adalah bagian dari *communicative discourse*—narasi untuk meraih konsensus publik. Namun, jika di *echo* secara *blunder* bisa memicu disonansi emosi publik. Bagi buruh misalnya, ada jurang antara narasi resmi (kerja layak) dan upah stagnan, lonjakan biaya hidup, ketidakadilan struktural lain—terutama di kalangan pekerja muda yang berada di posisi paling rentan (*precarity*) dalam konstruksi kebijakan ketenagakerjaan.

Fenomena viral seperti #KaburAjaDulu juga bukan sekadar *trending topic*, melainkan bentuk perlawanan moral publik melalui medium virtual: bentuk penolakan simbolik terhadap eksploitasi dan ketimpangan sosial. Tagar berfungsi sebagai *echo chamber* (kontra-hegemoni), tempat dimana publik merebut kembali otoritas tafsir realitas sosial, sekaligus mengekspresikan ketidaksesuaian antara janji-janji kebijakan pro rakyat dan fakta hidup sehari-hari yang merugikan hak-hak rakyat.

Ditinjau dari sisi psikologi politik, *blunder* elite memicu polarisasi lewat aspek *motivated reasoning*: dimana pendukung (*supporters*) elite cenderung melakukan *confirmation bias* (membenarkan atau merasionalisasi ucapan), sementara penentang (*opponents*) menerapkan *negativity bias* sehingga pernyataan *blunder* bertransformasi menjadi penanda identitas yang memperkeruh konflik di ruang digital (Marcus, et al., 2000). Dalam konteks *affective publics*, respon warganet bukan wujud reaksi rasional, melainkan ledakan emosional (*affective bursts*) yang membentuk solidaritas tentatif, namun memberi tekanan kolektif yang bisa memaksa klarifikasi, penarikan pernyataan, bahkan koreksi total kebijakan (Papacharissi, 2014).

Secara struktural, rangkaian *blunder* pejabat publik mengonfirmasi tesis bahwa di era hipertransparansi, legitimasi elite tidak lagi bersifat *ascribed* (berbasis jabatan), melainkan *achieved* (berbasis prestasi) yang akan terus dinegosiasikan lewat konsistensi tiga hal: nilai yang dianut, tindakan nyata, dan akuntabilitas naratif. Ketika salah satu dimensi—terutama dimensi kepekaan sosial dan prinsip kehati-hatian—dilanggar, maka kepercayaan publik akan runtuh secara eksponensial, bukan karena isi pesan, melainkan karena kegagalan moral dalam komunikasi: ketidakmampuan politisi atau pejabat publik mengakui warga sebagai subjek politik yang berhak atas penghormatan, empati, dan keterbukaan informasi publik.

Blunder komunikasi publik dan perilaku politik elite legislatif—mulai dari pernyataan Adies Kadir soal tunjangan Rp 50-78 juta/bulan tiap anggota DPR, respons kasar Ahmad Sahroni terhadap desakan pembubaran DPR (“*mental orang tolol*”), diksi elitis-sarkastis Deddy Sitorus (“*rakyat jelata*”), hingga aksi joget massal anggota DPR dalam Sidang Tahunan MPR—bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan gejala krisis psikologi politik struktural yang mengungkap tiga kegagalan politisi pasca reformasi: kegagalan normatif, kegagalan afektif, dan kegagalan institusional.

Pertama, secara normatif, pernyataan dan tindakan politisi parlemen telah melanggar prinsip *trusteeship representation*, di mana mereka seharusnya bertindak sebagai *trustee* yang mempertimbangkan kepentingan kolektif, bukan sebagai *delegate* yang sekedar mewakili kepentingan kelas atau kelompok elite tertentu (Andreweg & Thomassen, 2005). Diksi “*rakyat jelata*” atau “*orang tolol*”—meminjam tesis Pierre Bourdieu—merupakan bentuk nyata dari

reproduksi hierarki-simbolik yang melegitimasi dominasi kelas berkusa melalui perangkat bahasa—menempatkan posisi warga negara sebagai subjek yang layak dihina karena berani menantang otoritas parlemen (Murdock, 2010).

Kedua, secara afektif, *blunder-blunder* politik yang dilakukan politisi dan pejabat publik telah memicu emosional publik atau yang oleh Papacharissi (2014) disebut sebagai “*jurang emosional antara elite yang beroperasi dalam kepribadian antusias dan penuh energi (bubble privilege) dan publik yang mengalami kerentanan politik (political precarity)*” (Reilly, 2016). Saat elite legislatif merayakan naiknya besaran tunjangan sambil meremehkan tuntutan rakyat, mereka tidak hanya gagal menunjukkan empati, tetapi secara eksplisit menyangkal pengalaman pahit hidup yang dirasakan warga negara—sebuah bentuk *epistemic injustice*: merampas hak dan otoritas warga negara untuk berbicara tentang realitas hidup mereka. Reaksi publik terhadap opini *blunder* politisi bukanlah kemarahan irasional, melainkan kemarahan akibat *moral hazard*—terutama pelanggaran dalam aspek keadilan prosedural dan distributif (Schmidt, 2024).

Ketiga, secara institusional, fenomena joget massal di ruang sakral MPR/DPR—yang secara simbolis menjadi tempat dimana ke-*khidmat-an* atau kehormatan negara (*solemnity of the state*) dirayakan, justru diruntuhkan oleh politisi itu sendiri, dimana kepatuhan institusi terdegradasi (*institutional collapse*). Seperti disebut Couldry (2012), parlemen mengidap *crisis of symbolic power*: kehilangan kapasitas untuk mempertahankan batas resmi antara politik formal dan ruang hiburan. Otoritas politik parlemen sebagai penjaga demokrasi sudah merubah fungsi parlemen dari forum

deliberatif (arena dimana perdebatan kebijakan publik disusun), menjadi *political spectacle*: tempat selera rendah politisi dipertontonkan.

Secara kolektif, ragam kasus *blunder* elite mengonfirmasi bahwa institusi negara dan lembaga demokrasi saat ini mengalami krisis: akumulasi dari salah ucap dan salah bertindak dalam komunikasi. *Blunder* elite bukan sekedar *slip of tongue*, melainkan ungkapan tak sadar elite di area komunikasi publik yang berujung pada tuntutan reformasi sistemik (pembubaran) yang meledak hebat pada aksi 25-28 Agustus.

4. KESIMPULAN

Dinamika opini publik terhadap kinerja pejabat dan legitimasi aktor politik, sejak era reformasi hingga kini berada dalam ketegangan struktural antara viralitas dan *public trust*. *Blunder* komunikasi elite—baik verbal maupun perilaku—bukan sekedar kesalahan formal-individual, melainkan gejala runtuhnya kehati-hatian elite dan kerapuhan institusi. Kondisi ini kian memperdalam *distrust* antara elite *vis a vis* publik. Di era virtual, legitimasi tidak lagi diukur dari jabatan atau retorika politik, tetapi dari tiga aspek konsistensi: nilai, tindakan, dan akuntabilitas naratif. Saat elite gagal *declare* sikap empati, kehati-hatian, dan citra diri, wajar jika opini dan emosi publik berubah dari dukungan menjadi penolakan; dari viralitas menjadi ancaman legitimasi.

Di Indonesia, niat baik (*goodwill*) sering lebih penting daripada keahlian komunikasi. *Blunder* opini elite kini dianggap merendahkan *common sense* publik; punya daya rusak lebih parah ketimbang kesalahan teknis komunikasi. Pernyataan *blunder* elite akan memperdalam polarisasi. Saat seorang pejabat atau politisi keliru dalam menyampaikan kebenaran, maka

kesalahan ini tak hanya merusak kredibilitas, tetapi juga memicu kegelisahan, ketidakpastian, instabilitas politik, dan *mutual trust* antara negara dan warga negara. Memulihkan rasa percaya publik bukan sekedar soal menghindari *blunder*, melainkan soal membangun budaya komunikasi publik yang *humble*, responsif, cerdas, dan bernas serta berbasis pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak fundamen warga sebagai subjek politik berdaulat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andeweg, R., & Thomassen, J. (2005). Modes of Political Representation: Toward a New Typology. *Legislative Studies Quarterly*, 30(4): 507–528. doi: 10.3162/036298005X201653.
- Benoit, W. L. (1997) Image Repair Discourse and Crisis Communication. *Public Relations Review*, 23(2): 177-186. doi: 10.1016/S0363-8111(97)90023-0.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (2018) *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (Terjemahan Hasan Basri). Cet. XI. Jakarta: LP3ES.
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. Thousand Oaks, California: SAGE Publication Ltd.
- Couldry, N. & Hepp, A. (2017) *The Mediated Construction of Reality*. Cambridge, MA: Polity Press.
- CNN Indonesia (2025, August 22) *Sahroni Balas Kritik Desak Bubarkan DPR: Mental Orang Tolol Sedunia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250822195736/sahroni-balas-kritik-desak-bubarkan-dpr-mental-orang-tolol-sedunia>.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (5th

- eds.) Thousand Oaks, California: SAGE Publication Ltd.
- Detik.com (2025, March 25) *Pernyataan Hasan Nasbi soal Teror Babi ‘Dimasak Saja’ Dinilai Tak Pantas*. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7840383/elite-pdip-sebut-pernyataan-hasan-nasbi-arogan-soal-teror-babi-dimakan-saja>.
- Fairclough, N. (2025) *Analisis Wacana dan Perubahan Sosial: Aneka Pendekatan terhadap Analisis Wacana Kritis* (Terjemahan Hari Taqwan Santoso). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Fanani, A. F. (2025) Tekotok’s Digital Satire and Public Sentiment in Response to the Realities of Work in Indonesia. *Jurnal Politik*, 11(1): 35-66. doi: 10.7454/jp.v11i1.1321.
- Febrianto, A. et al (2025) Bureaucratic Reform and Public Trust: A Case Study of Indonesia’s ‘Zona Integritas’ Program in Immigration Services. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 9(10): 2828-2840. doi: 10.47772/IJRISS.2025.910000230.
- Flanagin, A. J., & Metzger, M. J. (2000) Perceptions of Internet Information Credibility. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 77(3): 515-540. doi: 10.1177/107769900007700304.
- Hafel, M. (2023) Digital Transformation in Politics and Governance in Indonesia: Opportunities and Challenges in the Era of Technological Disruption. *Society*, 11(2): 742-757. doi: 10.33019/society.v11i2.577.
- Haggard, S., & Kaufman, R. R. (2021) *Development, Democracy, and Welfare States: Latin America, East Asia, and Eastern Europe*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hine, C. (2015) *Ethnography for the Internet: Embedded, Embodied and Everyday*. London: Bloomsbury.
- Kompas.com (2025, November 13) ‘Purbaya Effect’ Dinilai Dorong Pertumbuhan Ekonomi. <https://money.kompas.com/read/2025/11/13/193249126/purbaya-effect-dinilai-dorong-pertumbuhan-ekonomi-lewat-likuiditas-perbankan>.
- Kompas.com (2025, February 02) *Soal #KaburAjaDulu, Wamenaker: Kabur Sajalah, kalau Perlu Jangan Balik Lagi*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/17/13051151/soal-kaburaja-dulu-wamenaker-kabur-sajalah-kalau-perlu-jangan-balik-lagi>.
- Kompas.com (2025, September 03) *Ahmad Sahroni, dari Blunder Diksi “Tolol” hingga Laporkan Penjarahan Rumah*. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/09/03/084500165/ahmad-sahroni-dari-blunder-diksi-tolol-hingga-laporkan-penjarahan-rumah?page=all>.
- Marcus, G. E. et al (2000) *Affective Intelligence and Political Judgment*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Masduki (2021) Media Control in the Digital Politics of Indonesia. *Media and Communication*, 9(4): 52-62. doi: 10.17645/mac.v9i4.4225.
- Murdock, G. (2010) Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste (Review Essay). *International Journal of Cultural Policy*, 16(1): 63-65. doi: 10.1080/10286630902952413.

- Papacharissi, Z. (2014) *Affective Publics: Sentiment, Technology, and Politics* (Oxford Studies in Digital Politics). New York: Oxford Academic.
- Pradipta, E. P. et al (2023) "Analysis of Political Polarization Discourse on Social Media Ahead of the 2024 Election", in Constantine Stephanidis, Margherita Antona, Stavroula Ntoa, & Gavriel Salvendy (eds.), *Communications in Computer and Information Science* (HCI International 2023 Posters). Switzerland: Springer Nature. (pp.95-102).
- Reilly, I (2016) *Affective Publics: Sentiment, Technology, and Politics* (Book Review). *International Journal of Communication*, Vol. 10: 2377–2380. Retrieved <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/5724>.
- Salma, A. (2024, November 25) Public Participation and Digital Propaganda in Indonesia: A New Form of State Control? <https://fulcrum.sg/public-participation-and-digital-propaganda-in-indonesia-a-new-form-of-state-control/>
- Schedler, A. et al. (1999) *The Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies*. London: Lynne Rienner Publishers Inc.
- Schmidt, V. (2008) Discursive Institutionalism: The Explanatory Power of Ideas and Discourse. *Annual Review of Political Science*, 11(1): 303-326. doi: 10.1146/annurev.polisci.11.060606.135342.
- Schmidt, E. (2024) Epistemic Injustice in Deliberative Mini Publics. *Journal of Deliberative Democracy* 20(1): 1-10. doi: <https://doi.org/10.16997/jdd.1493>.
- Setyawan, Y. et al. (2025) Digital Government Post-Reform in Indonesia: Normative Developments and Implementation by State Organizing Institutions. *Law Reform*, 21(1): 155-179. doi: 10.14710/lr.v21i1.68556.
- Sindonews.com (2025, March 25) *Wamenag Maklumi Ormas Minta THR: Budaya Sejak Dulu, Nggak Perlu Dipersoalkan*. <https://nasional.sindonews.com/read/1547501/15/wamenag-maklumi-ormas-minta-thr-budaya-sejak-dulu-nggak-perlu-dipersoalkan-1742868235>.
- Suara.com (2025, September 01) *Sebut Tidak Level dengan Rakyat Jelata, Ini Profil Dedy Sitorus dan Kontroversinya*. <https://www.suara.com/news/2025/09/01/150504/sebut-tidak-level-dengan-rakyat-jelata-ini-profil-dedy-sitorus-dan-kontroversinya>.
- Tapsell, R. (2017) *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution: Media, Culture and Communication in Asia-Pacific Societies*. London: Rowman & Littlefield Publishers Inc.
- Tarumingkeng, R. (2025) *Critical Discourse Analysis (CDA): Pengertian, Teori dan Aplikasi*. [https://rudyc.com/ab/Critical-Discourse-Analysis-\(CDA\)-Pengertian-Teori-dan-Aplikasi.pdf/](https://rudyc.com/ab/Critical-Discourse-Analysis-(CDA)-Pengertian-Teori-dan-Aplikasi.pdf/)
- Tempo.co (2025, March 18a) *KSAD Sebut Pengkritik RUU TNI Otak Kampungan*. <https://www.tempo.co/politik/ksad-sebut-pengkritik-ruu-tni-otak-kampunganusman-hamid-apakah-kosakata-itu-yang-diajarkan-ke-anggota--1221185>.
- Tempo.co (2025, March 23b) *Kepala BGN Ungkap Alasan PSSI Sulit Menang: Main 90 Menit Berat, Karena Gizinya Tidak Bagus*. <https://www.tempo.co/ekonomi/kepala-bgn-ungkap-alasan- PSSI-sulit-menang->

main-90-menit-berat-karena-gizinya-tidak-bagus-1223242.

Tempo Media's Post (2025, March 18c) *KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak Menyebut Pengkritik Revisi UU TNI Sebagai Otak Kampungan*. <https://www.facebook.com/TempoMedia/posts/ksad-jenderal-maruli-simanjuntak-menyebut-pengkritik-revisi-uu-tni-sebagai-otak-/1093143952851949/>

Tempo.co (2025 August 21d) *Adies Kadir Ralat Hitungan Tunjangan Rumah DPR Rp 50 Juta*. <https://www.tempo.co/ekonomi/adies-kadir-ralat-hitungan-tunjangan-rumah-dpr-rp-50-juta--2061637>.

Tribunnews.com (2025, November 05) *LENGKAP! Hasil Putusan 5 anggota DPR yang Bikin Ulah Berbuntut Demo Besar Agustus, Hukuman Terberat Disanksi 6 Bulan*. tribunnews.com/news/883467/lengkap-hasil-putusan-5-dpr-yang-bikin-ulah-berbuntut-demo-besar-agustus-terberat-disanksi-6-bulan.